

SKRIPSI

ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH :

YAYAN TRI WAHYUDI
NIM. 10875004060

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

Yayan Tri Wahyudi

NIM. 10875004060

Penelitian ini dilakukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari fungsi Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yaitu dalam pasal 11 disebutkan bahwa fungsi Kepala Desa adalah menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, dan menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub variabel penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Beringin Jaya terlaksana dalam kategori cukup baik.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis; Bapak Soderi dan Ibu Bariah, serta kepada bapak dan ibu mertua penulis; Bapak Sahli dan Ibu Suminem, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muslim, S. Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zamharil Yahya, MM dan Bapak Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji, serta Bapak Riki Handri Malau, SE, MM dan Bapak Mashuri, MA selaku Penguji I dan Penguji II pada ujian Munaqasah skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Budi Purnomo A.Ma, Pd selaku Kepala Desa Beringin Jaya, dan kepada seluruh Aparatur Pemerintah Desa Beringin Jaya beserta seluruh Kadus di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, bantuannya tidak akan penulis lupakan.
8. *For some one that always beside me*, Erlan Dwi Ardiansyah, terima kasih telah setia menemani hari-hari ayah, semoga bisa menjadi istri yang shalehah dunia akhirat, Amin...

9. Buat keluarga Mas Yahyo Barianto, SE dan kak Nanda Afdian, SE. serta keluarga Mas Yahya Nurul Hidayat, SE dan kak Nila Anggraini, SE. terima kasih atas supportnya selama ini. Juga buat keponakanku; Najwa Keisya Ayodia, Bintang Mayara Shifa Ayodia, dan Dzakkiya Yahya, doa Oom selalu buat kalian semua semoga menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara. Juga buat adik-adikku; Hendri Yatno, Agus Saputra, Ardiles Nuri Ardiansyah, mudah-mudahan kelak kita menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, Amin.
10. Buat teman-teman seperjuangan penulis, terutama Lokal B angkatan 2008 Jurusan Adm. Negara; Rhido Anggi Maryanto, Beni Utoro, Rahayu Andika Putri, Lidia Sandi, Friska Amelia, Sherli, M. Yasin, Nurdiansyah, M. Al-latif, Sufa Nabila, Nurush Sadri, Sri Yunita, Lia Rahma, Sugih, Irwansyah, Rahmat Hidayat Syah. Buat Tim Futsal Densus 88; Haris, Indra, Muis, RKP, Suhandri, Ryan, Alpi, Refli. kemudian buat bang Salman, bang Acil, bang Darbi, dan bang Alfian, Diki Idul Putra yang banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, *you're all my best friend*.

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 08 Januari 2012
Penulis

Yayan Tri Wahyudi
10875004060

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Otonomi Daerah	8
B. Otonomi Desa	16
C. Pemerintahan Desa.....	18
D. Pemerintah Desa	21
E. Pembangunan Desa	27
F. Defenisi Konsep	34
G. Defenisi Operasional	35
H. Hipotesis	37
I. Teknik Pengukuran	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel Penelitian	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel	45
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	47
E. Metode Pengumpulan Data Penelitian	47
F. Analisa Data	48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Beringin Jaya	49
B. Penduduk	50
C. Agama Penduduk	51
D. Pendidikan	53
E. Kesehatan	54
F. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencarian.....	54
G. Pemerintahan Desa	57
H. Sosial Budaya	60

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	63
1. Jenis Kelamin Responden	63
2. Umur Responden	63
3. Tingkat Pendidikan Responden	64
4. Mata Pencarian Responden	66
B. Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	67
1. Menggerakkan Kegiatan dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa	68
2. Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	76
3. Memfasilitasi upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.....	84
4. Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	91
C. Rekapitulasi Jawaban Responden	98

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Beringin Jaya Tahun 2011	4
Tabel II.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	36
Tabel III.1	Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian	46
Tabel IV.1	Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Beringin Jaya	50
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Beringin Jaya Menurut Umur dan Jenis Kelamin	51
Tabel IV.3	Jumlah Masyarakat Desa Beringin Jaya Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut.....	52
Tabel IV.4	Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Beringin Jaya.....	52
Tabel IV.5	Jenis Sarana Pendidikan di Desa Beringin Jaya	53
Tabel IV.6	Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Beringin Jaya	55
Tabel IV.7	Mata Pencarian Penduduk di Desa Beringin Jaya	55
Tabel V.1	Jenis Kelamin Responden.....	63
Tabel V.2	Tingkat Umur Responden.....	64
Tabel V.3	Tingkat Pendidikan Responden.....	65
Tabel V.4	Jenis Mata Pencarian Responden.....	66
Tabel V.5	Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Mereka Tentang Adanya Peraturan Desa	69
Tabel V.6	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Menjalankan Peraturan Desa.....	70
Tabel V.7	Jawaban Responden Mengenai Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya	71
Tabel V.8	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa	72
Tabel V.9	Jawaban Responden Mengenai Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya	74
Tabel V.10	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa	75

Tabel V.11	Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Desa	78
Tabel V.12	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Desa	78
Tabel V.13	Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Melakukan Pembinaan Perekonomian Desa	80
Tabel V.14	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Upaya Membina Perekonomian Desa	81
Tabel V.15	Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.....	82
Tabel V.16	Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya	83
Tabel V.17	Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	85
Tabel V.18	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	86
Tabel V.19	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	87
Tabel V.20	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pembangunan.....	89
Tabel V.21	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan	90
Tabel V.22	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Pembangunan	91
Tabel V.23	Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	92

Tabel V.24	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Menciptakan Suasana Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	93
Tabel V.25	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa.....	95
Tabel V.26	Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat yang Hidup dan Berkembang di Desa.....	97
Tabel V.27	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa....	98
Tabel V.28	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	99
Tabel V.29	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.....	100
Tabel V.30	Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	101
Tabel V.31	Rekapitulasi Seluruh Sub Variabel Penelitian.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan. tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan Undang-Undang tersebut adalah menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan antar daerah.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah, melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Adanya kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang pada masyarakat.

Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam seluruh proses kebijakan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah desa, terdapat dalam pasal 206 yaitu mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah/kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu pasal I ayat 6 disebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai pemegang pucuk pimpinan

tertinggi di desa, sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi, sanggup membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya kearah tujuan yang telah direncanakan.

Sebagai pimpinan tertinggi, kepala desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Selanjutnya fungsi pemerintah desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009, yaitu:

- a. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa;
- b. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, dalam penelitian ini potensi yang akan dilihat adalah fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Beringin Jaya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009.

Permasalahan mengenai fungsi pemerintah desa yang penulis temukan di Desa Beringin Jaya adalah tentang fungsi pemerintah desa dalam

melaksanaan pembangunan, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa dan pembangunan ekonomi desa. permasalahan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Desa Beringin Jaya Tahun 2011

No	Kegiatan pembangunan	Sasaran/Lokasi	Target	Realisasi
1	Pasar Desa	Dusun III	1	-
2	Jembatan	Dusun IV dan V	2	1
3	Drainase	Dusun I-V	5	3
4	Usaha Ekonomi Desa (UED)	Dusun I-V	5	2
5	Gedung TK	Dusun III	1	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Beringin Jaya, 2011

Dari tabel I.1 diatas, terlihat bahwa masih adanya kegiatan pembangunan yang belum terealisasi di desa Beringin Jaya, dimana pasar desa yang merupakan sarana penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat desa belum terealisasi pembangunanya, hal ini tentunya bisa menghambat atau memperlambat aktifitas ekonomi masyarakat desa. kemudian pembangunan jembatan yang direncanakan pembangunanya oleh pemerintah desa Beringin Jaya sebanyak 2 jembatan, yaitu di Dusun IV dan Dusun V, kenyataanya hanya 1 jembatan yang terealisasi pembangunanya, yaitu jembatan di Dusun IV. Sedangkan pembangunan drainase yang direncanakan di bangun di 5 (Lima) Dusun yang ada di Desa Beringin Jaya, realisasinya hanya di tiga dusun, yaitu Dusun I, III, dan IV. Kemudian pembangunan dibidang ekonomi desa, Pemerintah Desa Beringin Jaya membentuk Usaha Ekonomi Desa yang

disingkat UED, pembangunan UED ini direncanakan dibangun di semua Dusun yang ada di Desa Beringin Jaya, namun kenyataanya hanya 2 (dua) UED yang terelisasi, yaitu di dusun II dengan bentuk usaha tambak ikan lele dan ikan nila, dan di Dusun III dengan bentuk usaha kantin dan air minum isi ulang. Sedangkan pembangunan yang terealisasi sesuai perencanaan adalah pembangunan gedung TK yang berada di Dusun III.

Berdasarkan pengamatan dan data-data yang diperoleh penulis, dapat diungkapkan bahwa terlihat adanya gejala yang mendukung untuk diadakanya penelitian yang berhubungan dengan fungsi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi pemerintah desa dalam pembangunan yang berjudul ***“Analisis Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”***

B. Perumusan Masalah

Berpangkal tolak dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: ***“Bagaimanakah Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?”***

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah : ***“Untuk Mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”***

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kecamatan Singingi Hilir dalam melaksanakan pembangunan.
3. Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan, dalam penyelenggaraan pemerintahannya menekankan azas desentralisasi yang secara utuh dilaksanakan di Daerah Kota/Kabupaten untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dilakukan menurut prakarsanya sendiri serta didasari oleh aspirasi rakyat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Perbedaan mendasar antara pelaksanaan otonomi daerah dan era orde baru dengan pelaksanaan otonomi daerah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terletak pada azas desentralisasi. Pada masa orde baru penerapan otonomi daerah hanya dengan prinsip nyata dan bertanggung jawab, sedangkan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 penerapan otonomi daerah menekankan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. (Rasyid. 2002:284-285)

Otonomi daerah yang menganut prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan pemahaman yang tepat terhadap wawasan kebangsaan dimana pemahaman tersebut antara lain sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, pertahanan, keamanan, penanaman nilai-nilai kebangsaan serta rasa cinta tanah air, sebab tanpa pemahaman yang tepat, maka kebebasan ini dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

Otonomi berasal dari kata Yunani *outos* dan *nomos*, *outos* berarti “sendiri” dan *nomos* berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai *local self government*. (<http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/05/kuliah-tentang-otonomi-daerah.html>)

Sedangkan menurut Loggeman dalam tulisannya "*Het staatsrecht derzelfregerenda Gemenschappe*" istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas yang harus dipertanggung jawabkan.

Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur, yaitu:

- a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian itu.

Pemberian kekuasaan dalam istilah otonomi dalam arti bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah mempunyai sifat mendorong atau memberikan perangsangan untuk berusaha menumbuh dan mengembangkan keinginan sendiri, sifat itu membangkitkan otoaktivitas dan mempertinggi harga diri dalam arti yang sebaik-baiknya.

Otonomi daerah secara sederhana dapat diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri oleh satuan organisasi pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah inilah yang disebut dengan otonomi daerah (Garna,2000:246)

Pengertian otonomi daerah mengandung beberapa segi: *Pertama*, bahwa otonomi daerah bukan skema kedaulatan daerah dalam konteks Negara federal. Otonomi dalam rangka undang-undang 1945 pasal 18 yang menyebutkan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar klan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara klan hak asal usul dalam Negara yang bersifat istimewa.

Kedua, kebijakan otonomi lebih merupakan perubahan dalam tatanan susunan kekuasaan, termasuk di dalam perubahan dalam prinsip kerja pemerintah dimana daerah mendapatkan kemenangan untuk mengatur urusan daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian otonomi mempunyai arti adanya skema otonomi dipandang sebagai pendekatan baru dalam menjalankan pembangunan. Pendekatan baru ini tentunya membutuhkan bukti praktis dimana kekuasaan pusat memberikan kepercayaan penuh terhadap daerah untuk mensejahterahkan rakyat dengan tetap menjaga integrasi bangsa.

Ketiga, proses politik yang dijalankan orde baru yang tidak memberikan harga kepada partisipasi masyarakat telah dengan seksama menunjukkan bagaimana akibat dari elitesmi politik tersebut. Akibat dari sesuatu yang dimaksud tersebut bukan sesuatu yang harus ditanggung oleh elit melainkan oleh masyarakat. Dari ketiga segi tersebut dinyatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah sebuah koreksi terhadap struktur

kekuasaan yang semula lebih berakar keatas menjadi model baru yang berorientasi ke bawah. (Alexandar,2001:1-2)

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Widjaja,2003:243)

Ada beberapa prinsip otonomi daerah yang dijadikan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan perumahan , kawasan perkebunan, kawasan kehutanan, kawasan industri, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepala daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana. Serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan (Masykur, 2001:21)

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Undang-Undang No.32 Tahun 2004, yaitu:

- a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan
- c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan desa.

Pada umumnya faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. (Salam, 2003:94)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk

tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Di samping itu, juga memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar

otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Otonomi Desa

Menurut Wijaya (2003:165), otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Kemudian, dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, dijelaskan bahwa otonomi asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

Dalam pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau

organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur Pemerintahan Negara. (Juliantara,2000:18)

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 12, disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa genealogis yaitu dengan yang bersifat administratif ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai

lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabnya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyatakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat.

C. Pemerintahan Desa

Pengertian Pemerintahan Desa menurut Amin Suprihatini (2007:9) yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan badan perangkat desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa.

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Wewenang pemerintahan desa yaitu mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya, dan mendamaikan perkara dari para warganya. Pemerintahan desa berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanjadesa dan keputusan kepala desa. fungsi pemerintahan adalah memimpin, memberi petunjuk, memerintah, mengarahkan, koordinasi, pengawasan dan inovasi dalam pemerintaha. (Hamdi, 2006:22)

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan

masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan peraturan pemerintah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

D. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

Dari tugas pokok tersebut lahir fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi pemerintah desa merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial suatu kelompok masyarakat (Rivai, 2004:53)

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Fungsi Konsultatif. Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang di pimpinnya.

3. Fungsi Partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.
4. Fungsi Delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.
5. Fungsi Pengendalian. Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan.
(Hadari Nawawi 1995:74)

Kemudian dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada Bab IV Pasal 9 dijelaskan mengenai tugas dan wewenang pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai peraturan desa;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- d. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
- i. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Kemudian dalam Pasal 10 dijelaskan tentang kewajiban pemerintah desa yaitu sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Selanjutnya, fungsi Pemerintah Desa dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 tahun 2009 yaitu:

- a. menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa;
- b. menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Penjelasan tentang urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan lain-lain. Kemudian penjelasan mengenai urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Dan penjelasan tentang memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat yang dimaksud adalah dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, yaitu dengan memfasilitasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah dengan menjaga ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

Dari ketentuan diatas telah dijelaskan fungsi dan tugas pemerintah desa, akan tetapi perlu diketahui bahwa pentingnya kerjasama dengan orang lain dalam rangka pencapaian tujuan, apakah itu tujuan individu atau kelompok. Berangkat dari kenyataan bahwa secara intern dalam diri setiap manusia terdapat keterbatasan-keterbatasan, baik dalam arti fisik maupun intelektual. Dalam berbagai keterbatasan tersebut tidak memungkinkan seseorang manusia

memuaskan segala keinginan, harapan, cita-cita dan kebutuhannya apabila bekerja sendirian tanpa bantuan oleh orang lain.

Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai jati diri yang khas dengan cita-cita, harapan, keinginan dan kebutuhan yang berbeda, perbedaan tersebut harus diterima dan diakui sebagai kenyataan. Mengakui dan menerima kenyataan secara implisit juga berarti bahwa manusia merupakan makhluk yang dinamis. Salah satu implikasi dinamika itu ialah bahwa makin maju seseorang dan suatu masyarakat maka kebutuhannya pada gilirannya menjadikan upaya pencapaiannya semakin sulit (Siagian, 2000:132).

Dua manifestasi yang menonjol dari dinamika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Semakin maju suatu masyarakat, mereka semakin sadar bahwa pemuasan kebutuhan yang bersifat fisik saja seperti sandang, pangan dan papan tidak lagi memadai seperti kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan sosial, pengakuan akan harkat dan martabat, serta jaminan perolehan haknya terutama yang bersifat azasi.
2. Berkat keberhasilan suatu Negara menyelenggarakan pembangunan dibidang sosial budaya khususnya pendidikan, warga Negara dan masyarakat semakin cerdas sehingga membuat mereka semakin sadar akan hak dan kewajiban, meskipun harus diakui bahwa tidak sedikit diantara mereka yang cenderung lebih mengutamakan perolehan haknya dibandingkan dari kewajiban

Dari dua hal diatas terlihat bahwa dinamika masyarakat baik secara individu sebagai masyarakat dan akhirnya sebagai bangsa menuntut peningkatan peranan pemerintah desa dengan seluruh jajarannya untuk memainkan peranan secara proaktif dan menyelenggarakan fungsinya secara efisiensi dan efektif.

Untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi pemerintah desa tersebut maka perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.

E. Pembangunan Desa

Pembangunan yaitu suatu proses perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Spalding (dalam Tjokroamidjojo, 1991:223)

Kemudian, yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah merupakan suatu proses usaha pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan itu sendiri (Taliziduhu Ndraha 1991:11)

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil,
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sector, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah harus mempunyai pendekatan dan strategi-strategi dalam pembangunan agar bias menimbulkan partisipasi masyarakat, strategi terpadu dan menyeluruh. Pembangunan masyarakat desa menggunakan pendekatan, yakni:

1. Tujuan utama adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa.

2. Sasaran adalah pembangunan dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah.
3. Lingkupnya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks.
4. Koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun disemua tingkatan, fungsi, kebutuhan dan mekanismenya.
5. Arus komunikasinya dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horizontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasive dan edukatif.
6. Tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus-menerus.

Telah dijelaskan diatas bahwa tujuan utama dari pembangunan desa adalah pertumbuhan, persamaan, dan kesejahteraan, namun itu semua tidak akan bisa dicapai tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dianggap sebagai hal yang sangat penting, sebab masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu maka masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan memunculkan kemandirian masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya, yang secara bertahap akan menimbulkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat tersebut secara maksimal.

Menurut Tjokromidjojo (dalam Safi'i, 2007:104) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:

- a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Sedangkan jenis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Hamidjojo (1978: 18) adalah :

- a. Partisipasi buah pikiran merupakan kemampuan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah melalui musyawarah untuk mengawasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.
- b. Partisipasi keterampilan yang merupakan kemampuan masyarakat untuk mengerahkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam dan nilai-nilai sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Partisipasi tenaga yang merupakan kemampuan masyarakat untuk menyumbangkan tenaganya khususnya tenaga kasar yang bersifat hastawi bagi proyek pembangunan seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.

- d. Partisipasi harta benda yang merupakan kemampuan masyarakat untuk memberikan atau menyumbangkan harta benda terhadap usaha-usaha yang diserahkan oleh masyarakat akan meringankan beban hidup bersama dan sesamanya seperti membuat jalan, jembatan dan lain sebagainya.
- e. Partisipasi uang yaitu kemampuan masyarakat untuk memberikan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Dari jenis partisipasi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan dapat berupa sumbangan pemikiran, keterampilan, tenaga, harta, dan uang yang dapat digunakan untuk membantu pembangunan yang dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah.

Kemudian menurut Taliziduhu Ndraha ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, sebagai berikut:

1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud seperti rapat mingguan di desa, seminar, penataran-penataran.
2. Wadah partisipasi tenaga. Yang diberikan dalam perbaikan pembangunan agar partisipasi tenaga merupakan pendorong, perlu di usahakan penertiban, penjelasan-penjelasan tentang manfaat. Dari partisipasi ini banyak hal yang didapat antara lain bangkitnya rasa berlomba, rasa tanggung jawab.

3. Wadah partisipasi benda. Dikalangan masyarakat masih hidup kesediaan memberikan harta benda terhadap usaha yang dirasakan meringankan beban hidup mereka seperti perbaikan kondisi jalan, sumbangan, ronda malam.
4. Wadah partisipasi keterampilan. Di desa banyak yang memiliki keterampilan, tetapi belakangan ini mengalami skill drain, karena mereka telah mengalir ke kota.

Partisipasi yang melibatkan warga desa adalah menyangkut keikutsertaan yang bertalian dengan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang dapat terlihat dari bentuk partisipasi masyarakat baik dari segi moral ataupun material. Ikut menyumbang ide-ide, peduli terhadap pembuatan keputusan dan hasil keputusan, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan desa dan senantiasa menunaikan kewajibannya selaku warga Negara yang baik yaitu dengan membayar pajak yang berguna pendanaan pembangunan di desa itu sendiri pada khususnya maupun untuk pembangunan Negara ada umumnya merupakan sedikit contoh bagaimana bentuk dari partisipasi masyarakat yang harus dilakukan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang sering diabaikan dan hampir tidak kelihatan adalah partisipasi dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan bahwa selama ini kebijakan-kebijakan yang ada adalah kebijakan yang diambil secara sepihak yaitu pemerintahan itu sendiri baik dari level yang paling atas (pemerintah pusat) sampai pada akhirnya jatuh kepada kepala desa. Pengambilan keputusan ini

seringkali tidak melibatkan masyarakat desa sehingga pada tiap-tiap desa untuk wilayah tertentu akan sulit menterjemahkan kebijakan yang ada karena tidak sesuai dengan kondisi maupun keinginan masyarakat setempat.

F. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 1995:33)

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

- a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Otonomi Asli memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan desa yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- f. Pembangunan desa adalah suatu proses usaha pemerintah desa dalam melakukan perubahan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik, yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana, ekonomi, sosial, dan budaya.
- g. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam bentuk uang (benda), pikiran (ide), tenaga (gotong royong).

G. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (1995:46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Yang menjadi variabel dalam penelitian adalah Fungsi Pemerintah Desa.

Kemudian, Variabel Fungsi Pemerintah Desa adalah dilihat dari Fungsi Kepala Desa mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 tahun 2009, tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Operasionalisasi variabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Fungsi Kepala Desa	1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa	a. Menjalankan Peraturan Desa b. Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa c. Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa
	2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa b. Membina perekonomian desa c. Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat
	3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat	a. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan b. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan c. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan d. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan e. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan
	4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat	a. Memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat b. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa c. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa

Sumber: Data Olahan 2011

H. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam latar belakang masalah dan dihubungkan dengan uraian telaah pustaka, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, yaitu: *“Diduga Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, karena masih belum terlaksananya secara maksimal fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, serta menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.”*

I. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan, maka penulis melakukan pengukuran dengan menggunakan *skala likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Sugiyono (2003:107)

Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban dari responden dalam kuesioner diberi skor :

1. Baik diberi skor 3
2. Cukup Baik diberi skor 2
3. Tidak Baik diberi skor 1

Kemudian untuk menganalisis sub variabel penelitian, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya, untuk mengetahui nilai interval yaitu dengan menggunakan formula :

Skor Tertinggi : Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi Skor Terendah : Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah Interval : $\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Skala}}$

Jadi, dari formula diatas, dapat diketahui bahwa:

- a. Untuk menganalisis Sub Variabel dengan 3 indikator yaitu:

$$\text{Skor Tertinggi} : 3 \times 97 \times 3 = 873$$

$$\text{Skor Terendah} : 3 \times 97 \times 1 = 291$$

$$\text{Interval} : 873 - 291 / 3 = 194$$

- b. Untuk menganalisis Sub Variabel dengan 5 indikator yaitu:

$$\text{Skor Tertinggi} : 5 \times 97 \times 3 = 1455$$

$$\text{Skor Terendah} : 5 \times 97 \times 1 = 485$$

$$\text{Interval} : 1455 - 485 / 3 = 323,3$$

Dengan menggunakan acuan nilai diatas, maka dapat dinyatakan bahwa sub variabel :

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, pengukuranya adalah dengan 3 indikator yang dinilai dengan skor tertinggi 873 dan skor terendah 291 dengan nilai interval 194 dinyatakan :

Baik : Apabila Sub Variabel menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 679 – 873.

Cukup Baik : Apabila Sub Variabel menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 485 – 678.

Tidak Baik : Apabila Sub Variabel menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 291 – 484.

2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, pengukuranya adalah dengan 3 indikator yang dinilai dengan skor tertinggi 873 dan skor terendah 291 dengan nilai interval 194 dinyatakan :

Baik : Apabila Sub Variabel menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 679 – 873.

Cukup Baik : Apabila Sub Variabel menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 485 – 678.

Tidak Baik : Apabila Sub Variabel menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 291 – 484.

3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, pengukurannya adalah dengan 5 indikator yang dinilai dengan skor tertinggi 1455 dan skor terendah 485 dengan nilai interval 323,3 dinyatakan :

Baik : Apabila Sub Variabel memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 1131,6 – 1455.

Cukup Baik : Apabila Sub Variabel memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat,

berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 808,3 – 1131,5.

Tidak Baik : Apabila Sub Variabel memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 485 – 808,2.

4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, pengukurannya adalah dengan 3 indikator yang dinilai dengan skor tertinggi 873 dan skor terendah 291 dengan nilai interval 194 dinyatakan :

Baik : Apabila Sub Variabel menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 679 – 873.

Cukup Baik : Apabila Sub Variabel menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 485 – 678.

Tidak Baik : Apabila Sub Variabel menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan 291 – 484.

Kemudian untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pemerintah dalam Pembangunan, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya, untuk mengetahui nilai interval yaitu dengan menggunakan formula:

Skor Rata-rata Tertinggi	: Jumlah Sub Variabel x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi
Skor Rata-rata Terendah	: Jumlah Sub Variabel x Jumlah Responden x Nilai Terendah
Interval	: $\frac{\text{Skor Rata-rata Tertinggi} - \text{Skor Rata-rata Terendah}}{\text{Skala}}$

Jadi, dari formula diatas dapat diketahui bahwa:

$$\text{Skor Rata-rata Tertinggi} : 4 \times 97 \times 3 = 1164$$

$$\text{Skor Rata-rata Terendah} : 4 \times 97 \times 1 = 388$$

$$\text{Interval} : 1164 - 388 / 3 = 258,6$$

Kemudian, untuk mengetahui pelaksanaan variabel fungsi secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan hasil seluruh rekapitulasi setiap sub variabel kemudian dibagi dengan jumlah sub variabel penelitian. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan, pengukurannya adalah dengan 4 Sub Variabel yang dinilai dengan skor rata-rata tertinggi 1164 dan skor rata-rata terendah 388 dengan nilai interval 258,6 dinyatakan :

Baik : Apabila Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan skor rata-rata 905,2 – 1164.

- Cukup Baik : Apabila Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan skor rata-rata 646,6 – 905,1.
- Tidak Baik : Apabila Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan, berdasarkan jawaban responden mendapatkan perolehan skor rata-rata 388 – 646,5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama (data penelitian) yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan variabel penelitian. Data yang dikumpul dari responden penelitian dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Bertitik tolak dari penjelasan diatas maka penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitanya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan September sampai Desember Tahun 2011

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2003:90), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Beringin Jaya.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian.

Adapun sampel dari masyarakat diambil dengan menggunakan teori Slovin, jumlah sampel diketahui dengan menggunakan rumus Slovin (Dalam Umar, 2004:146) yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{3823}{1 + 3823(10\%)^2}$$

$$n = \frac{3823}{1 + 3823(0.01)}$$

$$n = \frac{3823}{39,23}$$

$$n = 97,45$$

$$n = 97$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Error 10% (Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel).

Jadi, dari hitungan jumlah populasi dari masyarakat sebanyak 3.823 Orang, dengan kelonggaran 10%, maka hasil penghitungan dengan menggunakan rumus Slovin tersebut didapat sampel sebanyak 97,45 yang dibulatkan menjadi 97 orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode *Random sampling* yaitu pengambilan sample yang dilakukan secara acak.

Adapun teknik pengambilan sampel dari tokoh masyarakat adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni di ambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tokoh masyarakat yang dijadikan sampel adalah 5 orang yang terdiri dari tokoh adat dan budaya, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, dan tokoh politik yang ada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari aparaturnya pemerintah desa menggunakan teknik *Sensus*, yaitu keseluruhan populasi dari aparaturnya pemerintah desa diambil semuanya sebagai sampel.

Untuk lebih jelasnya, penetapan jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.1
Penetapan Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi (Orang)	Populasi (Orang)	Sampel (Orang)
1	Pemerintah Desa	10	10
2	Tokoh Masyarakat	5	5
3	Masyarakat	3.823	97
	Jumlah	3.842	116

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh melalui kegiatan yang di lakukan di lokasi penelitian (lapangan) melalui pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang di peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian antara lain :
 - a. Lokasi penelitian.
 - b. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat.
 - c. Data sekunder lain yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Pengamatan langsung (*observation*). yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara (*interview*), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan penulis untuk dijadikan bahan dalam pembuatan penelitian ini.
4. Kuesioner atau angket, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian

F. Analisa Data

Penelitian ini merupakan suatu kajian deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam Pembangunan. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah, lalu memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan, kemudian diambil kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Beringin Jaya

Desa Beringin Jaya merupakan salah satu desa diantara 12 desa yang berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Beringin Jaya terletak di sebelah selatan ibukota Kecamatan Singingi Hilir. Adapun batas-batas dari Desa Beringin Jaya adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Perkebunan sawit PT Adimulia Agro Lestari
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Tesso

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka wilayah Desa Beringin Jaya ini mempunyai jarak :

1. Jarak dengan Ibu Kota Provinsi \pm 112 Km
2. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 87 Km
3. Jarak dengan Ibu Kota Kecamatan \pm 22 Km

Adapun luas Desa Beringin Jaya adalah 2.840 Hektar, sebagian besar terdiri dari perkebunan kelapa sawit, perumahan masyarakat, fasilitas umum desa dan sebagian kecil daerah rawa dan hutan.

Untuk lebih jelasnya, persentase penggunaan areal pertanahan Desa Beringin Jaya dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel VI.1
Persentase Penggunaan Areal Pertanahan Desa Beringin Jaya
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Penggunaan	Luas (Hektar)	Persentase (%)
1	Perumahan	895	31,5
2	Perkebunan	1605	56,5
3	Fasilitas Umum Desa	315	11,1
4	Rawa dan Hutan	25	0,9
Jumlah		2840	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dari tabel diatas terlihat bahwa penggunaan areal pertanahan Desa Beringin Jaya sebagian besar digunakan untuk perkebunan yaitu 1605 Hektar atau 56,5 %, untuk perumahan seluas 896 Hektar atau 31,5 %, kemudian Fasilitas Umum Desa seperti jalan, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana olahraga, pasar, dan lain-lain penggunaanya seluas 314 hektar atau 11,1 %, dan luas rawa dan hutan yang ada di Desa Beringin Jaya hanya 25 Hektar atau 0,9 %.

B. Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Beringin Jaya pada umumnya adalah orang suku Jawa dan suku Sunda. Namun beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa pendatang yang berasal dari Sumatra Utara. Berdasarkan perhitungan penduduk sampai akhir tahun 2011 jumlah penduduk Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 3823 jiwa yang terdiri dari 1013 KK.

Berikut ini adalah tabel tentang jumlah penduduk Desa Beringin Jaya menurut jenis kelamin dan umur.

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Desa Beringin Jaya Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	0 – 9 Tahun	150	168	318	8,3
2	10 – 19 Tahun	313	201	514	13,4
3	20 – 29 Tahun	322	261	583	15,3
4	30 – 39 Tahun	397	372	769	20,1
5	40 - 49 Tahun	393	289	682	17,8
6	50 – 59 Tahun	218	258	476	12,5
7	60 – 69 Tahun	134	184	318	8,3
8	70 Tahun keatas	76	87	163	4,3
Jumlah		2003	1820	3823	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa keadaan penduduk Desa Beringin Jaya dari jenis kelamin laki-laki adalah 2003 orang, sedangkan dari jenis kelamin perempuan adalah 1820 orang. Selanjutnya dilihat dari kelompok usia 30-39 tahun merupakan kelompok usia yang paling produktif dengan jumlah 769 orang atau 20,1 %, dan jumlah yang paling sedikit adalah kelompok usia 70 Tahun keatas dengan jumlah 163 orang atau 4,3 % dari jumlah penduduk Desa Beringin Jaya.

C. Agama Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Beringin Jaya adalah Suku Jawa dan Sunda yang sangat kuat memeluk agama Islam, meskipun beberapa tahun terakhir ada pendatang yang berasal dari Sumatera Utara yang memeluk agama Kristen.

Berdasarkan komposisi penduduk yang ada di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3
Jumlah Masyarakat Desa Beringin Jaya Berdasarkan Agama Yang Mereka Anut

No	Agama	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	3796	99,30
2	Kristen	19	0,50
3	Budha	8	0,20
	Jumlah	3823	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Beringin Jaya beragama Islam dengan jumlah 3796 orang atau 99,30%, kemudian yang beragama Kristen berjumlah 19 orang atau 0,50%, dan yang beragama Budha berjumlah 8 orang atau 0,20%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah beragama Islam.

Berbicara mengenai Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana peribadatan yang ada di Desa Beringin Jaya, adapun sarana peribadatan yang ada di Desa Beringin Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4
Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Beringin Jaya

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	17
3	Gereja	0
	Jumlah	22

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berada di Desa Beringin Jaya terdiri dari 5 Masjid, 17 Musholla, dan tidak terdapat Gereja. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat

Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah beragama Islam.

Sejauh pengamatan penulis di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kondisi tempat ibadah termasuk dalam kondisi layak dan terawat dengan baik, sebab dari 5 Masjid dan 17 Musholla yang ada di Desa Beringin Jaya semuanya masih terpakai oleh warga yang berada di sekitar tempat-tempat ibadah tersebut untuk melakukan ibadah sholat berjamaah dan mengaji.

D. Pendidikan

Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk Desa Beringin Jaya menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tidak banyaknya jumlah penduduk yang buta huruf dalam artian banyak penduduk yang sudah bisa membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf atau tidak bisa membaca dan menulis adalah orang tua yang berumur diatas 60 tahun, hal ini dikarenakan pada zaman dahulu belum banyak tempat pendidikan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel IV.5
Jenis Sarana Pendidikan di Desa Beringin Jaya

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	2 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit
3	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1 Unit
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1 Unit
JUMLAH		7 Unit

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Beringin Jaya cukuplah memadai untuk sebuah desa. Itu dapat dilihat dengan adanya 2 (dua) Taman Kanak-Kanak, 3 (tiga) Sekolah Dasar, 1 (satu) Madrasah Diniyah Awaliyah, dan 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dan dapatlah diambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Beringin Jaya sudah mulai kearah yang lebih baik dengan tidak banyaknya penduduk yang buta huruf karena tidak mengenyam pendidikan.

E. Kesehatan

Pelayanan masyarakat dibidang kesehatan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami kemajuan, karena sudah adanya Puskesmas Desa, dimana keberadaan Puskesmas Desa sangat membantu masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan, Kelurga Berencana , pemeriksaan kehamilan sampai proses persalinan, dan pemeriksaan kesehatan masyarakat lainnya.

F. Tingkat Pendapatan dan Mata Pencaharian

Desa Beringin Jaya merupakan daerah yang terletak pada daerah dataran rendah namun berbukit yang tanahnya sangat cocok untuk dijadikan lahan perkebunan. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Beringin Jaya memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunana sawit yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat setempat.

Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat di Desa Beringin Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6
Tingkat Pendapatan Masyarakat di Desa Beringin Jaya

No	Mata Pencaharian	Penghasilan per Bulan (Rupiah)
1	Petani/ pemilik lahan sawit	Rp. 1-6 Juta
2	PNS	Rp. 2-3 Juta
3	Pedagang	Rp. 2-3 Juta
4	Supir	Rp. 1,5-2 Juta
5	Beternak	Rp. 2-3 Juta
6	Tukang Kayu	Rp. 1-2 Juta
7	Karyawan Pabrik	Rp. 1,5-3 Juta

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dilihat dari tabel diatas penghasilan masyarakat Desa Beringin Jaya yang mempunyai penghasilan paling tinggi adalah petani sawit atau pemilik lahan sawit pribadi dengan penghasilan Rp. 1-6 juta per bulannya dan yang paling rendah adalah tukang kayu dengan penghasilan 1-2 juta per bulannya. Dengan keadaan pendapatan yang demikian dapat kita lihat bahwa tingkat pendapatan untuk ukuran masyarakat dalam suatu desa sudah sangat baik.

Kemudian, mata pencaharian umumnya masyarakat Desa Beringin Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Beringin Jaya

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani/ pemilik lahan sawit	1568	79,9
2	PNS	22	1,1
3	Pedagang	69	3,5
4	Supir	43	2,2
5	Peternak	16	0,8
6	Tukang Kayu	35	1,8
7	Karyawan Pabrik	183	9,3
8	Lain-lain	27	1,4
Jumlah		1963	100 %

Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

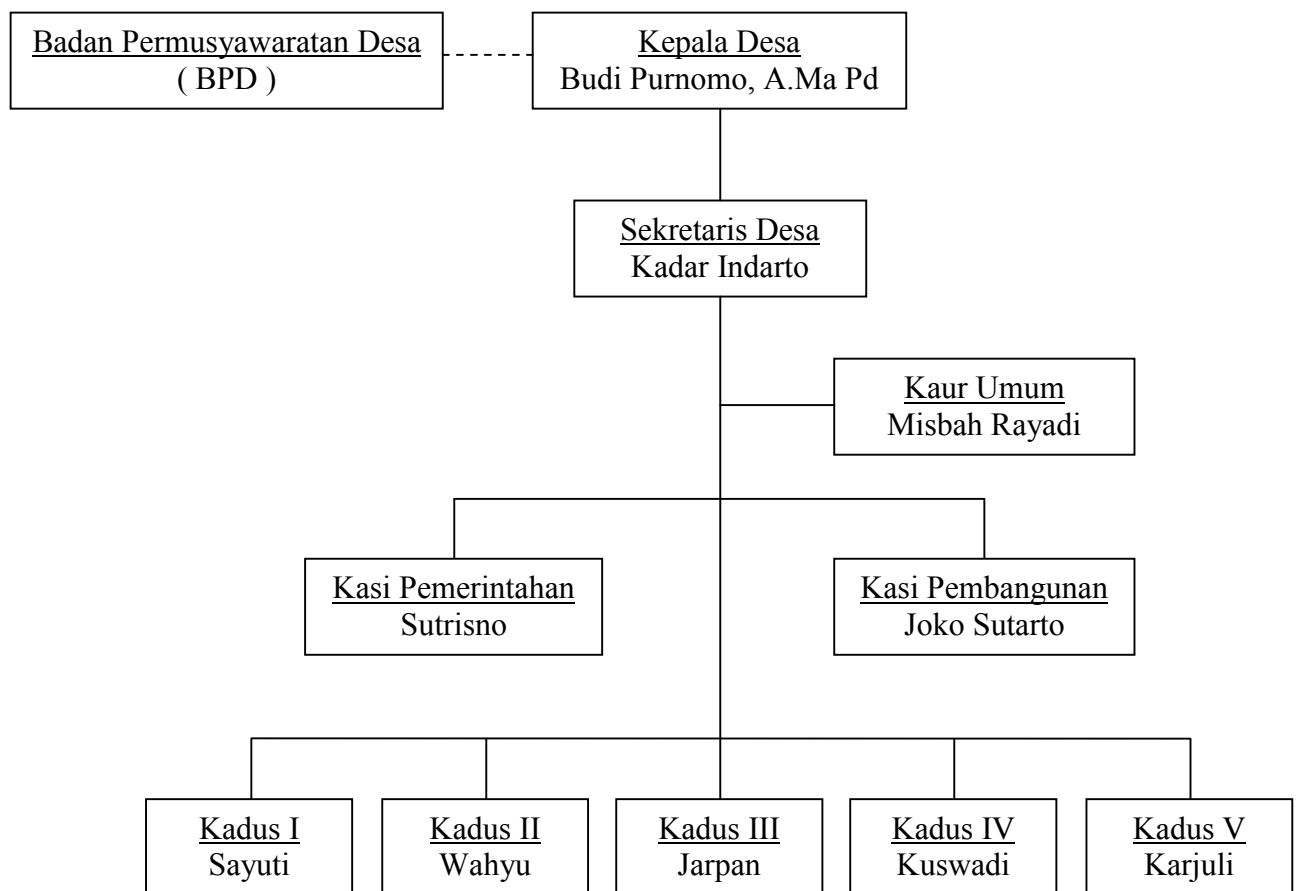
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar dari penduduk Desa Beringin Jaya adalah bermata pencaharian petani sawit yakni sebanyak 1568 orang atau 79,9 %, bekerja sebagai PNS sebanyak 22 orang atau sekitar 1,1 %, sebagai pedagang 69 orang atau 3,5 %, supir sebanyak 43 orang atau sekitar 2,2 %, bekerja sebagai peternak 16 orang atau sekitar 0,8 %, sebagai tukang kayu 35 orang atau sekitar 1,8 %, bekerja sebagai karyawan pabrik sebanyak 183 orang atau sekitar 9,3 %, dan pekerjaan lain-lain seperti usaha perbengkelan, pangkas rambut, pencari ikan, usaha cucian mobil dan sepeda motor, dll sebanyak 27 orang atau sekitar 1,4 %.

Kemudian dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Beringin Jaya cenderung lebih memilih mengolah dan menggarap lahan sawit miliknya atau bekerja menggarap lahan sawit milik orang lain dari pada menjadi PNS, pedagang, supir, beternak, tukang kayu, maupun menjadi karyawan pabrik. Sebab berdasarkan hasil pengamatan penulis, masyarakat yang bekerja atau mengolah lahan sawit mempunyai penghasilan yang relatif tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga bagi warga yang tidak mempunyai lahan milik pribadi mereka bisa bekerja pada warga yang memiliki lahan sawit.

G. Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan Desa Beringin Jaya dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar IV.1
Bagan Pemerintahan Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Kepala Desa Beringin Jaya 2011

Dari bagan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pimpinan yang menjalankan hak, wewenang, kewajiban, dan fungsi dalam pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Urusan (Kaur)

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
- b. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

4. Kepala Seksi (Kasi)

- a. Kepala seksi adalah unsure pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu kepala desa dalam urusan teknis tertentu.
- b. Kepala seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Kepala seksi mempunyai fungsi menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan serta melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa

5. Kepala Dusun (Kadus)

- a. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa
- b. Kepala Dusun melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala desa

- d. Membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- g. Dalam melaksanakan tugasnya kepala dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 5 dusun, yaitu:

- 1. Dusun I (Pelita)
- 2. Dusun II (Sidodadi)
- 3. Dusun III (Marga Mulya)
- 4. Dusun IV (Marga Sukajaya)
- 5. Dusun V (Mulyo Rejo)

H. Sosial Budaya

Mengenai aspek sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup banyak, dalam hal ini merupakan khazanah budaya daerah Jawa dibawa dan dikembangkan dari turun temurun oleh masyarakat Desa Beringin Jaya.

Adapun aspek sosial budaya yang sangat berharga diantaranya :

- a) Wayang kulit
- b) Jaran kepang/ kuda kepang
- c) Reog Ponorogo

d) Perkumpulan Wirid Yasin

Masyarakat Desa Beringin Jaya telah lama membudayakan kerja sama dan persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk menghibur masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia dengan cara membaca Surat Yasin bersama-sama.

Adapun Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai kegiatan tahunan yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya, yaitu *Resik Deso* atau Bersih Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang penyajian data yang diperoleh penulis selama masa penelitian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara langsung, dan mengambil referensi dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini bersifat terbuka dan tertutup, responden hanya memilih salah satu jawaban yang tersedia beserta alasannya. Kemudian setiap jawaban dari pertanyaan dalam kuesioner akan didistribusikan dalam bentuk tabel frekuensi.

Hasil penelitian akan dibagi ke dalam tiga bagian, yang meliputi:

1. Bagian Pertama berisikan pertanyaan yang memuat identitas responden.
2. Bagian Kedua berisikan pertanyaan dan jawaban responden dari masing-masing indikator dalam setiap sub variabel penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel.
3. Bagian Ketiga berisikan rekapitulasi jawaban responden dalam setiap sub variabel penelitian.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari kuesioner tersebut, dibawah ini disajikan tabel-tabel yang disertai dengan jawaban responden kemudian diinterpretasikan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin Responden

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai identitas responden berikut ini penulis akan menguraikan mengenai identitas responden menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	62	63,91
2.	Perempuan	35	36,09
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel untuk responden sebanyak 97 orang, yang keseluruhannya terdiri dari 62 responden laki-laki atau 63,91%, sedangkan responden perempuan sebanyak 35 responden atau 36,09%. Jadi jumlah keseluruhan jumlah responden yang dijadikan sampel dari masyarakat Desa Beringin Jaya adalah 97 orang.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 62 orang atau 63,91%, dan kebanyakan responden yang diambil untuk sampel penelitian ini adalah dari kepala keluarga.

2. Umur Responden

Untuk mengetahui tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2
Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	17 - 25 Tahun	17	17,53
2.	26 - 34 Tahun	31	31,96
3.	35 - 43 Tahun	26	26,80
4.	44 Tahun keatas	23	23,71
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden terbanyak adalah pada tingkat umur 26-34 tahun yaitu sebanyak 31 responden atau 31,96%. Tingkat umur 17-25 sebanyak 17 responden atau 17,53%, kemudian tingkat umur 35-43 sebanyak 26 responden atau 26,80%, dan tingkat umur 44 tahun keatas berjumlah 23 responden atau 23,71%.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa tingkat umur responden sudah cukup dewasa dalam memberikan tanggapan-tanggapannya terhadap pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini, sebab asumsi penulis adalah kedewasaan umur dapat memberikan isyarat terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan pikir yang lebih matang dan lebih bijak, karena umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan sangat diperlukan dalam pembangunan, karena dengan pendidikanlah sumber daya manusianya akan berkualitas. Untuk mengetahui gambaran dan tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	14	14,43
2	SD	31	31,96
3	SMP / Sederajat	23	23,71
4	SLTA / Sederajat	18	18,56
5	Perguruan Tinggi	11	11,34
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang terpilih dalam penelitian ini adalah 97 responden dengan berbagai tingkatan pendidikan yaitu, yang mempunyai latar belakang tidak tamat SD sebanyak 14 orang responden atau 14,43%, tamat SD sebanyak 31 responden atau 31,96%, tamatan SMP sebanyak 23 responden atau 23,71%, tamatan SLTA 18 responden atau 18,56%, dan yang mempunyai latar belakang lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 11 responden atau 11,34%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan responden sudah dapat dikatakan baik karena mayoritas responden paling tidak sudah mengenyam pendidikan di SD, meskipun ada juga sebagian kecil responden yang tidak tamat SD yaitu responden yang termasuk dalam kategori umur 44 tahun keatas. Namun demikian, variasi tingkat pendidikan responden sudah cukup baik karena mencakup seluruh tingkat pendidikan yakni mulai dari tingkat SD, SMP, SLTA dan ada juga yang Perguruan Tinggi.

4. Mata Pencaharian Responden

Berikut ini adalah data responden dilihat dari mata pencaharian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.4
Jenis Mata Pencaharian Responden

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	57	58,76
2	Karyawan Pabrik	18	18,56
3	Pedagang	9	9,28
4	PNS	5	5,15
5	Tidak Bekerja	8	8,25
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian responden adalah petani yaitu 57 orang atau 58,76%, karyawan pabrik sebanyak 18 orang atau 18,56%, pedagang sebanyak 9 orang atau 9,28%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 5 orang atau 5,15%, dan responden yang tidak bekerja sebanyak 8 orang atau 8,25%.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian responden adalah sebagai petani yaitu 57 orang, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian bahwa bertani adalah jenis mata pencaharian utama masyarakat di desa beringin jaya, jenis pertaniannya yaitu kelapa sawit. Kemudian untuk 18 orang responden yang mempunyai mata pencaharian sebagai karyawan pabrik, berdasarkan observasi langsung penulis adalah karyawan yang bekerja di pabrik pengolahan kelapa sawit PT Adimulia Agro Lestari, yangmana pabrik ini berada di Desa Sukamaju yang berbatasan langsung dengan Desa Beringin Jaya. Kemudian untuk 9 orang

responden yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang, berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian adalah pemilik warung atau kedai yang terletak di Desa Beringin Jaya, selanjutnya untuk 5 orang responden yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah para guru Sekolah Dasar yang berada di Desa Beringin Jaya. Dan untuk 8 orang responden yang tidak bekerja, berdasarkan pengamatan penulis adalah dari responden yang berjenis kelamin perempuan.

B. Fungsi Pemerintah Desa dalam Pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Pembangunan Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh Pemerintah Desa (kepala desa) sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di desa dan sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa (kepala desa) harus mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengaktifkan peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakatnya dengan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta sanggup membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya ke arah tujuan yang telah direncanakan.

Demi tercapainya tujuan pembangunan desa, pemerintah desa (kepala desa) harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

kemudian fungsi pemerintah desa terdapat dalam pasal 11 yaitu:

1. Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa;
2. Menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
4. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun hasil penelitian penulis mengenai fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan sub variabel yaitu :

1. Menggerakkan Kegiatan dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa.

Yang dimaksud dengan menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti menjalankan peraturan desa, menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa, dan menggerakkan badan usaha milik desa.

Kemudian, dibawah ini akan disajikan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan indikatornya yaitu :

a. Menjalankan Peraturan Desa

Peraturan Desa (Perdes) adalah ketentuan atau produk hukum yang disusun dan ditetapkan secara bersama-sama, oleh Pemerintah Desa (Pendes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pedoman dan bersifat mengikat semua pihak, dalam lingkup wilayah desa.

Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui bahwa di desa beringin jaya sudah ada peraturan desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.5
Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Mereka Tentang
Adanya Peraturan Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ada	31	31,96
2.	Tidak Ada	17	17,52
3.	Tidak Tahu	49	50,52
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 31 orang atau 31,96% mengetahui bahwa pemerintah desa beringin jaya sudah membentuk peraturan desa, sebanyak 17 orang atau 17,52% menyatakan bahwa di desa beringin jaya tidak ada di buat peraturan desa oleh pemerintah desa, dan 49 orang atau 50,52% menyatakan tidak tahu tentang adanya peraturan desa beringin Jaya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui peraturan desa yang

dibuat oleh pemerintah desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam menjalankan Peraturan Desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.6
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam Menjalankan Peraturan Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	16	16,49
2.	Cukup Baik	33	34,02
3.	Tidak Baik	48	49,49
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah desa beringin jaya dalam menjalankan peraturan desa mengatakan baik sebanyak 16 orang atau 16,49%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 33 orang atau 34,02%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 48 orang atau 49,49%.

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat penelitian, Pemerintah Desa Beringin Jaya beserta Badan Permusyawaratan Desa telah membuat Peraturan Desa (Perdes), yaitu tentang peraturan desa tentang pendapatan asli desa, peraturan desa tentang pembentukan badan usaha milik desa, dan peraturan desa tentang aturan perangkat desa, namun berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan desa tersebut.

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, dapat dianalisa bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan Perdes disebabkan karena kurangnya sosialisasi pemerintah desa dalam mensosialisasikan peraturan desa kepada masyarakat di Desa Beringin Jaya. Analisa ini didukung oleh pendapat tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Ketua BPD Desa Beringin Jaya yaitu Bapak Sukisno dalam wawancara dengan penulis pada Tanggal 20 November 2011, beliau mengatakan :

“ Pemerintah Desa dan BPD sudah membuat dan mengesahkan Peraturan Desa, namun tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham dan tidak mengetahui tentang keberadaan Perdes tersebut.”

Sosialisasi merupakan kata kunci bagi kesuksesan sebuah produk hukum (Perdes), dengan sosialisasi yang baik maka akan memunculkan partisipasi aktif masyarakat terhadap keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan desa, sejauh pengamatan penulis dilokasi penelitian, pemerintah desa beringin jaya tidak melakukan sosialisasi terhadap perdes yang telah dibentuk bersama BPD, hal ini akan menimbulkan akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa beringin jaya.

b. Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui adanya lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh pemerintah Desa Beringin Jaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.7
Jawaban Responden Mengenai Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ada	86	88,66
2.	Tidak Ada	-	-
3.	Tidak Tahu	11	11,34
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 86 orang atau 88,66% sudah mengetahui bahwa pemerintah desa beringin jaya sudah membentuk lembaga kemasyarakatan desa, dan 11 orang atau 11,34% responden menyatakan tidak tahu tentang adanya lembaga kemasyarakatan desa Beringin Jaya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang adanya lembaga kemasyarakatan desa di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.8
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah
Desa dalam Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	27	27,84
2.	Cukup Baik	58	59,79
3.	Tidak Baik	12	12,37
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah desa beringin jaya dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa mengatakan baik sebanyak 27 orang atau 27,84%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 58 orang atau 59,79%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 12 orang atau 12.37%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Beringin Jaya termasuk dalam kategori cukup baik, yaitu mengacu pada pernyataan 58 responden atau 59,79%.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah menumbuhkembangkan partisipasi, kegotongroyongan dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. sedangkan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan

- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Berdasarkan pengamatan penulis dilokasi penelitian, jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Beringi Jaya yaitu:

- a. Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW) ;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Adat.

Kemudian, selama dalam waktu penelitian yang penulis lakukan di desa beringin jaya, pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa berjalan cukup baik, analisa ini didukung oleh pendapat tokoh masyarakat desa beringin jaya, yaitu bapak Suyono, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan:

“Untuk membantu tugas pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan, peran lembaga kemasyarakatan desa sudah berjalan, seperti adanya RT/RW dan Karang Taruna desa beringin jaya. setiap ada kegiatan desa, kepala desa dan perangkatnya selalu berkoordinasi dengan RT/RW dan Karang Taruna, sehingga memperlancar program-program pembangunan desa”.

c. Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa

Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui adanya badan usaha milik desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.9
Jawaban Responden Mengenai Keberadaan Badan Usaha Milik
Desa Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ada	78	80,41
2.	Tidak Ada	7	7,22
3.	Tidak Tahu	12	12,37
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 78 orang atau 80,41% sudah mengetahui bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya sudah membentuk badan usaha milik desa, sebanyak 7 orang atau 7,22% menyatakan bahwa di desa beringin jaya tidak ada di bentuk peraturan badan usaha milik desa oleh pemerintah desa, dan 12 orang atau 12,37% menyatakan tidak tahu tentang adanya badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah Desa Beringin Jaya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden mengetahui tentang keberadaan badan usaha milik desa di Desa Beringin Jaya.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.10
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah
Desa dalam Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	15	15,46
2.	Cukup Baik	31	31,96
3.	Tidak Baik	51	52,58
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah desa beringin jaya dalam menggerakkan badan usaha milik desa mengatakan Baik sebanyak 15 orang atau 15,46%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 31 orang atau 31,96%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 51 orang atau 52,58%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan badan usaha milik desa tidak berjalan baik, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Marjo Tanjung yang mengatakan:

“ Penggerakkan yang dilalukan oleh Pemerintah Desa dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa tidak berjalan semestinya, sebab dari target Badan Usaha Milik Desa yang direncanakan dibangun di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Beringin Jaya, hanya 2 yang jadi kenyataan yaitu di Dusun II dan Dusun III”.

2. Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu fungsi yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa, pembangunan tersebut berupa pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, pembangunan ekonomi desa, dan pembangunan dibidang sosial budaya masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa indikator yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana fasilitas umum desa
- b. Membina perekonomian desa
- c. Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat

Adapun hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan indikatornya yaitu :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Salah satu prioritas kebutuhan masyarakat desa yang utama adalah pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.11
Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Melakukan
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana dan
Prasarana Fasilitas Umum Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ya	97	100
2.	Tidak	-	-
3.	Tidak Tahu	-	-
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 97 orang atau 100% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa berupa pembangunan fisik, antara lain, pembangunan jembatan desa, pembangunan drainase, pembangunan gedung TK, dan pembangunan pasar yang masih dalam proses pembangunan.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.12
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah
Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyediaan
Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	17	17,53
2.	Cukup Baik	36	37,11
3.	Tidak Baik	44	45,36
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi pemerintah desa beringin jaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa mengatakan baik sebanyak 17 orang atau 17,53%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 36 orang atau 37,11%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 44 orang atau 45,36%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa fungsi Pemerintah Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa tidak berjalan baik. Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 20 November 2011 dengan kepala desa beringin jaya, yaitu Bapak Budi purnomo, A.Ma, Pd. Beliau mengatakan:

“ Dalam pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum di Desa Beringin Jaya ini menghadapi banyak kendala, diantaranya yaitu permasalahan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya uang dan tenaga. Biaya pembangunan fisik bukan hanya murni dari pemerintah daerah, namun membutuhkan swadaya dari masyarakat, contohnya dalam pembangunan pasar, kurangnya swadaya dari masyarakat menjadi penyebab terhambatnya

pembangunan pasar desa. selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong juga menjadi penyebab tidak terlaksananya pembangunan fisik di desa beringin jaya dengan maksimal. Namun secara keseluruhan, pembangunan fisik di desa beringin jaya sudah terlaksana, walaupun belum memenuhi target yang telah direncanakan sebelumnya.”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas, penulis menganalisa bahwa pemerintah desa beringin jaya sudah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, namun dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut maka upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa kurang berjalan dengan baik.

b. Membina Perekonomian Desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah Pemerintah Desa melakukan pembinaan perekonomian desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.13
Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Melakukan Pembinaan Perekonomian Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ya	91	93,82
2.	Tidak	3	3,09
3.	Tidak Tahu	3	3,09
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 91 orang atau 93,82% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya melakukan pembinaan perekonomian desa, kemudian sebanyak 3 orang atau 3,09%

responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya tidak melakukan pembinaan perekonomian desa, dan sebanyak 3 orang atau 3,09% responden mengatakan tidak tahu tentang pembinaan perekonomian desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Beringin Jaya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya telah melakukan pembinaan perekonomian desa.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa dalam upaya membina perekonomian desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.14
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah
Desa dalam Upaya Membina Perekonomian Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	22	22,68
2.	Cukup Baik	24	24,74
3.	Tidak Baik	51	52,58
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya membina perekonomian desa mengatakan baik sebanyak 22 orang atau 22,68%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 24 orang atau 24,74%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 51 orang atau 52,58%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya membina perekonomian desa tidak berjalan baik, dengan mengacu pada pernyataan 51 responden atau 52,58%. Hal ini sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam membina perekonomian desa tidak sesuai dengan target perencanaan, contohnya dalam pengembangan usaha ekonomi desa, yangmana perencanaanya adalah diseluruh dusun yang ada di Desa Beringin Jaya, yaitu 5 (lima) dusun, namun kenyataanya yang terealisasi hanya di 2 (dua) dusun. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah desa dalam membina perekonomian desa tidak berjalan dengan baik.

c. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.15
Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ya	92	94,85
2.	Tidak	2	2,06
3.	Tidak Tahu	3	3,09
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 92 orang atau 94,85% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, kemudian sebanyak 2 orang atau 2,06% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya tidak melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, dan sebanyak 3 orang atau 3,09% responden mengatakan tidak tahu tentang pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Beringin Jaya. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya telah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.16
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintah
Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembinaan
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	48	49,49
2.	Cukup Baik	43	44,33
3.	Tidak Baik	6	6,18
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat mengatakan baik sebanyak 48 orang atau 49,49%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 43 orang atau 44,33%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 6 orang atau 6,18%.

Dari hasil penelitian diatas, dapat dinyatakan bahwa fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat sudah berjalan dengan baik, berdasarkan pengamatan penulis dilokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa peduli dengan kehidupan sosial budaya masyarakat desa beringin jaya, hal ini terlihat dalam setiap adanya kegiatan acara yang dilakukakan oleh desa seperti acara hari kemerdekaan dan acara kunjungan pejabat pemerintah daerah selalu ada pergelaran budaya dari masyarakat, seperti roeg dan jaran kepeng yang merupakan budaya masyarakat Desa Beringin Jaya. Analisa ini diperkuat oleh pendapat salah satu tokoh adat dan budaya masyarakat Desa Beringin Jaya, yaitu bapak Slamet Riadi, dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 21 November 2011 beliau mengatakan:

“ Budaya masyarakat didesa Beringin Jaya ini masih tetap terjaga dan berkembang, seperti budaya jaran kepeng, roeg ponorogo, pencak silat dan wayang kulit yang merupakan budaya asli dari jawa, dalam hal ini pemerintah desa selalu melakukan pembinaan dan memfasilitasi pergelaran budaya-budaya tersebut, contohnya pada acara pertemuan budaya se-kecamatan dan se-kabupaten Kuansing, acara tujuh belasan, dan acara pesta masyarakat.”

3. Memfasilitasi upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Beringin Jaya tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sendiri, sebab objek dari pembangunan adalah masyarakat, sehingga apabila masyarakat acuh terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, maka pembangunan di desa itu tidak akan terlaksana dengan baik.

Partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan yang memadai, tetapi banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respons masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan upaya dari pemerintah desa dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, artinya pemerintah desa harus memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah Pemerintah Desa Beringin Jaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.17
Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ya	82	84,53
2.	Tidak	7	7,22
3.	Tidak Tahu	8	8,25
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 82 orang atau 84,53% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemudian sebanyak 7 orang atau 7,22% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya tidak memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan sebanyak 8 orang atau 8,25% responden mengatakan tidak tahu tentang upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun hasil penelitian penulis mengenai fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa berdasarkan indikatornya yaitu :

a. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.18
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam
Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	30	30,93
2.	Cukup Baik	46	47,42
3.	Tidak Baik	21	21,65
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mengatakan baik sebanyak 30 orang atau 30,93%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 46 orang atau 47,42%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 21 orang atau 21,65%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa upaya Pemerintah Desa beringin Jaya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan cukup baik, berdasarkan hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, diketahui bahwa bentuk fasilitas tersebut adalah dengan memberikan undangan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam manghadiri rapat

dan kemudian memberikan ide-ide atau masukan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

b. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.19
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	26	26,80
2.	Cukup Baik	52	53,61
3.	Tidak Baik	19	19,59
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan mengatakan baik sebanyak 26 orang atau 26,80%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 52 orang atau 53,61%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 19 orang atau 19,59%.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa upaya Pemerintah Desa beringin Jaya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup baik. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 November 2011 dengan salah satu aparatur

pemerintah desa, yaitu bapak Joko Sutarto yang menjabat sebagai Kaur Pembangunan, beliau mengatakan:

“ Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa beringin jaya sepenuhnya membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa, partisipasi tersebut bisa dalam bentuk pikiran, tenaga maupun uang. Menurut saya, jika partisipasi pikiran dan uang tidak mau, alangkah baiknya menyumbangkan dalam bentuk tenaga, toh pemerintah desa selalu memberikan undangan gotong royong setiap ada kegiatan pembangunan sarana umum desa.”

c. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pembangunan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya pemerintah desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.20
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	23	23,71
2.	Cukup Baik	61	62,89
3.	Tidak Baik	13	13,40
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan mengatakan baik sebanyak 23 orang atau 23,71%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 61 orang atau 62,89%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 13 orang atau 13,40%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan di Desa Beringin Jaya terlaksana cukup baik, yaitu mengacu pada pernyataan 61 responden atau 62,89%.

d. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya Pemerintah Desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.21
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	39	40,21
2.	Cukup Baik	42	43,30
3.	Tidak Baik	16	16,49
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan mengatakan baik sebanyak 39 orang atau 40,21%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 42 orang atau 43,30%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 16 orang atau 16,49%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat

dalam pengembangan pembangunan di Desa Beringin Jaya terlaksana cukup baik, yaitu mengacu pada pernyataan 42 responden atau 43,30%.

e. Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Pembangunan

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya Pemerintah Desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.22
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam
Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian
Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	38	39,17
2.	Cukup Baik	45	46,40
3.	Tidak Baik	14	14,43
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan mengatakan baik sebanyak 38 orang atau 39,17%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 45 orang atau 46,40%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 14 orang atau 14,43%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan di Desa Beringin Jaya terlaksana cukup baik, yaitu mengacu pada pernyataan 45 responden atau 46,40%.

4. Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam skema pembangunan desa, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan desa. dalam hal ini, pemerintah desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk dapat menciptakan suasana nyaman dan aman bagi semua lapisan masyarakat.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai apakah Pemerintah Desa Beringin Jaya menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.23
Jawaban Responden Mengenai apakah Pemerintah Desa Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Ya	87	89,69
2.	Tidak	3	3,09
3.	Tidak Tahu	7	7,22
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 87 orang atau 89,69% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, kemudian sebanyak 3 orang atau 3,09% responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya tidak menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan sebanyak 7 orang atau 7,22% responden mengatakan tidak tahu tentang upaya pemerintah desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa

sebagian besar responden mengatakan bahwa Pemerintah Desa Beringin Jaya menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun hasil penelitian penulis mengenai fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan Indikatornya yaitu :

a. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya Pemerintah Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.24
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Menciptakan Suasana Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	37	38,14
2.	Cukup Baik	42	43,30
3.	Tidak Baik	18	18,56
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat mengatakan baik sebanyak 37 orang atau 38,14%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 42 orang atau 43,30%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 18 orang atau 18,56%.

Dari penjelasan diatas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam upaya menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Beringin Jaya terlaksana cukup baik,

yaitu mengacu pada pernyataan 42 responden atau 43,30%. Namun ada sebagian responden yaitu 18 orang atau 18,56% menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak berjalan dengan baik, berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian, diketahui bahwa indikasi dari pernyataan tersebut adalah terkait masalah keamanan di lahan sawit warga, sebab beberapa tahun terakhir ini marak pencurian hasil panen sawit, masyarakat desa beringin jaya menyebutnya dengan istilah “ninja sawit”, menurut warga setempat pemerintah desa kurang tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencuri sawit tersebut, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelakunya. Analisa ini didukung oleh pendapat tokoh masyarakat yaitu bapak Gunawan Rujito, dalam wawancara dengan penulis beliau mengatakan:

“Beberapa tahun terakhir ini, ada sebagian warga yang resah dengan maraknya ninja sawit di desa beringin jaya, walaupun kemaren ini ada yang tertangkap pelakunya, tapi tidak diberikan hukuman yang setimpal oleh pemerintah desa, hanya diberi peringatan, jadi tidak membikin jera pencuri tersebut”

b. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa

Didalam ruang lingkup kehidupan sosial seperti masyarakat, tentu terkadang ada perselisihan yang terjadi, oleh karena itu dibutuhkan peran atau upaya dari pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya dalam penyelesaian perselisihan tersebut demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya

Pemerintah Desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.25
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	31	31,96
2.	Cukup Baik	50	51,55
3.	Tidak Baik	16	16,49
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat desa mengatakan baik sebanyak 31 orang atau 31,96%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 50 orang atau 51,55%, dan yang mengatakan tidak baik sebanyak 16 orang atau 16,49%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa upaya Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa cukup baik, namun ada beberapa responden yaitu ada 16 orang atau 16,49% yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat desa tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa indikasinya adalah ada beberapa perselisihan masyarakat mengenai sengketa lahan yang penyelesaiannya sampai sekarang belum selesai. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai hak

warisan yang belum selesai sampai sekarang. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis pada tanggal 20 November 2011 dengan salah satu aparat desa, yaitu bapak Misbah Rayadi yang menjabat sebagai Kaur Umum, beliau mengatakan:

“Dalam upaya mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat, pemerintah desa mengusahakan jalan damai, yaitu dengan mendudukkan pihak-pihak yang berselisih dalam suatu forum musyawarah di kantor desa, seperti dalam sengketa tanah antara bapak Nurhadi dengan Bapak Suparman, penyelesaian sengketa tersebut berakhir dengan damai dan adil, namun ada beberapa kasus sengketa lahan yang masih belum menemui jalan keluarnya, sebab masing-masing pihak yang bersengketa sepertinya enggan untuk duduk bersama, mungkin karena takut kehilangan ladangnya”.

c. Menjaga Kelestarian Adat Istiadat yang Hidup dan Berkembang di Desa

Pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang upaya Pemerintah Desa dalam menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V.26
Jawaban Responden Mengenai Upaya Pemerintah Desa Dalam Menjaga Kelestarian Adat Istiadat yang Hidup dan Berkembang di Desa

No	Jawaban	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1.	Baik	49	50,51
2.	Cukup Baik	40	41,24
3.	Tidak Baik	8	8,25
JUMLAH		97	100 %

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, diketahui bahwa jawaban responden mengenai pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Beringin Jaya dalam upaya menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa mengatakan baik sebanyak 49 orang atau 50,51%, kemudian yang mengatakan cukup baik sebanyak 40 orang atau 41,24%, dan yang menyatakan tidak baik sebanyak 8 orang atau 8,25%.

Dari penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan baik terhadap pelaksanaan fungsi pemerintah desa beringin jaya dalam upaya menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis di lokasi penelitian bahwa pemerintah desa beringin jaya menjaga kelestarian adat dan istiadat yang hidup di desa, seperti dalam gotong royong pembangunan rumah warga, dan gotong royong dalam acara Khitan atau perkawinan warga desa yang dikenal dengan sebutan “rewang”.

C. Rekapitulasi Jawaban Responden dalam setiap Sub Variabel Penelitian.

Secara keseluruhan, rekapitulasi dan analisis hasil penelitian terhadap masing-masing sub variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggerakkan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa.

Tabel V.27
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa
Dalam Menggerakkan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Desa

No	Indikator	Tanggapan Responden		
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1	Menjalankan Peraturan Desa	16	33	48
2	Menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan Desa	27	58	12
3	Menggerakkan Badan Usaha Milik Desa	15	31	51
Skor		58 x 3	122 x 2	111 x 1
Jumlah		174	244	111

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 3 indikator yang diteliti dari sub variabel menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik totalnya adalah 58 x 3 jumlahnya 174, kemudian yang menyatakan Cukup Baik totalnya adalah 122 x 2 jumlahnya 244, dan yang menyatakan Tidak Baik totalnya adalah 111 x 1 jumlahnya 111.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 3 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa beringin jaya mendapat perolehan skor 529, dan dinyatakan dalam kategori **Cukup Baik**.

2. Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tabel V.28
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa
Dalam Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	Tanggapan Responden		
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1	Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa	17	36	44
2	Membina perekonomian desa	22	24	51
3	Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat	48	43	6
Skor		87 x 3	103 x 2	101 x 1
Jumlah		261	206	101

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 3 indikator yang diteliti dari sub variabel menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik totalnya adalah 87 x 3 jumlahnya 261, kemudian yang menyatakan Cukup Baik totalnya adalah 103 x 2 jumlahnya 206, dan yang menyatakan Tidak Baik totalnya adalah 101 x 1 jumlahnya 101.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 3 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di desa beringin jaya mendapat perolehan skor 568, dan dinyatakan dalam kategori **Cukup Baik**.

3. Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

Tabel V.29
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa Dalam Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

No	Indikator	Tanggapan Responden		
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1	Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	30	46	21
2	Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	26	52	19
3	Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pembangunan	23	61	13
4	Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan	39	42	16
5	Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan	38	45	14
Skor		156 x 3	246 x 2	83 x 1
Jumlah		468	492	83

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti dari sub variabel memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat, tanggapan responden yang menyatakan Baik totalnya adalah 156 x 3 jumlahnya 468, kemudian yang menyatakan Cukup Baik totalnya adalah 246 x 2 jumlahnya 492, dan yang menyatakan Tidak Baik totalnya adalah 83 x 1 jumlahnya 83.

Kemudian berdasarkan penjumlahan dari 5 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa fungsi pemerintah desa dalam Memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat di desa beringin jaya mendapat perolehan skor 1043, dan dinyatakan dalam kategori **Cukup Baik**.

4. Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Tabel V.30
Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Fungsi Pemerintah Desa
Dalam Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Indikator	Tanggapan Responden		
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1	Memelihara ketentraman, dan ketertiban masyarakat	37	42	18
2	Mendamaikan perselisihan masyarakat desa	31	50	16
3	Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa	49	40	8
Skor		117 x 3	132 x 2	42 x 1
Jumlah		351	264	42

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 3 indikator yang diteliti dari sub variabel menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, tanggapan responden yang menyatakan Baik totalnya adalah 117 x 3 jumlahnya 351, kemudian yang menyatakan Cukup Baik totalnya adalah 132 x 2 jumlahnya 264, dan yang menyatakan Tidak Baik totalnya adalah 42 x 1 jumlahnya 42.

Berdasarkan penjumlahan dari 3 indikator yang diteliti, maka diketahui bahwa fungsi pemerintah desa dalam Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa beringin jaya mendapat perolehan skor 657, dan dinyatakan dalam kategori **Cukup Baik**.

Kemudian, untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut :

Tabel V.31
Rekapitulasi Seluruh Sub Variabel Penelitian

No	Sub Variabel	Tanggapan Responden		
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
1	Menggerakkan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Desa	174	244	111
2	Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	261	206	101
3	Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	468	492	83
4	Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	351	264	42
Jumlah		1254	1206	337
Jumlah Skor		2797		
Jumlah Sub Variabel		4		
Jumlah Skor Rata-rata		699,25		
Kategori		Cukup Baik		

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2011

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 4 sub variabel yang diteliti, tanggapan responden yang menyatakan Baik jumlah skornya adalah 1254, kemudian yang menyatakan Cukup Baik jumlah skornya adalah 1206, dan yang menyatakan Tidak Baik jumlah skornya adalah 337. Sehingga diketahui bahwa jumlah keseluruhan skor adalah 2797. Kemudian untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan adalah dengan menghitung nilai rata-ratanya yaitu dengan cara membagi jumlah keseluruhan skor dengan jumlah sub variabel (Jumlah skor dibagi jumlah sub variabel), dari penjumlahan tersebut maka diketahui bahwa jumlah skor rata-rata adalah 699,25 dan dinyatakan dalam kategori **Cukup Baik**.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian penulis dengan judul fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penulis mengambil kesimpulan berdasarkan sub variabel penelitian, adapun kesimpulanya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa Beringin Jaya diukur dengan tiga indikator yaitu:
 - a. menjalankan peraturan desa
 - b. menggerakkan lembaga kemasyarakatan desa
 - c. menggerakkan badan usaha milik desa

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukkan bahwa dari pengukuran ketiga indikator diatas, diketahui fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa mendapat perolehan skor 529, dan dapat disimpulkan terlaksana Cukup Baik (Tabel V.27).

Namun, sesuai dengan pembahasan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah desa beringin jaya dalam menjalankan fungsi menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

- a. masyarakat desa beringin jaya masih banyak yang tidak mengetahui tentang keberadaan peraturan desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan BPD (tabel V.5), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa beringin jaya kurang melakukan sosialisasi terhadap peraturan desa kepada masyarakat desa.
 - b. fungsi menggerakkan badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah desa beringin jaya tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, dari lima target pembangunan badan usaha milik desa hanya dua yang terealisasi.
2. Pelaksanaan fungsi menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Beringin Jaya diukur dengan tiga indikator yaitu:
- a. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasaran fasilitas umum desa
 - b. Membina perekonomian desa
 - c. Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukkan bahwa dari pengukuran ketiga indikator diatas diketahui fungsi pemerintah desa dalam menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa mendapat perolehan skor 568, dan dapat disimpulkan terlaksana Cukup Baik (Tabel V.28).

Namun sesuai dengan pembahasan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah desa beringin jaya dalam menjalankan fungsi menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai beberapa hambatan, yaitu:

- a. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum desa.
- b. Kurangnya program-program pembangunan ekonomi dari pemerintah desa dalam rangka membina perekonomian desa.

3. Pelaksanaan Fungsi memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat di Desa Beringin Jaya diukur dengan lima indikator, yaitu memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukkan bahwa dari pengukuran kelima indikator tersebut diketahui fungsi pemerintah desa dalam memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat mendapat perolehan skor 1043, dan dapat disimpulkan terlaksana Cukup Baik (Tabel V.29).

4. Pelaksanaan fungsi menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Beringin Jaya diukur dengan tiga indikator yaitu:

- a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- c. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian menunjukkan bahwa dari pengukuran tiga indikator diatas diketahui fungsi pemerintah desa dalam menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Beringin Jaya mendapat perolehan skor 657, dan dapat disimpulkan terlaksana Cukup Baik (Tabel V.30)

Namun, sesuai dengan pembahasan hasil penelitian, diketahui bahwa pemerintah desa beringin jaya dalam menjalankan fungsi menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah desa beringin jaya kepada warga yang membuat resah masyarakat desa, khususnya petani. contohnya adalah dalam kasus pencurian hasil panen sawit, walaupun pelakunya sudah ada yang tertangkap, namun tidak diberikan sanksi yang tegas, hanya diberikan peringatan, sehingga tidak memberikan efek jera pada pelakunya.
 - b. Upaya pemerintah desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa masih belum maksimal, hal itu terlihat dari masih adanya kasus sengketa lahan yang sampai sekarang belum selesai penyelesaiannya.
5. Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam pembangunan di Desa Beringin Jaya adalah diukur dari keempat sub variabel yang telah dijelaskan diatas, dan dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam

pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mendapat perolehan skor rata-rata 699,25 dan dinyatakan dalam kategori **Cukup Baik** (Tabel V.31).

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada pemerintah desa demi tercapainya tujuan pembangunan di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk mencapai target dari tujuan pembangunan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat desa perlu adanya sosialisasi program-program pembangunan tersebut. oleh sebab itu, diharapkan pemerintah Desa Beringin Jaya lebih meningkatkan sosialisasi program-program pembangunan kepada masyarakat.
2. Pemerintah Desa Beingin Jaya hendaknya berusaha lebih keras dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.
3. Demi menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat hendaknya Pemerintah Desa Beringin Jaya memberikan sanksi tegas kepada warga yang telah membuat resah masyarakat desa, sehingga membuat efek jera terhadap warga tersebut.
4. Pemerintah Desa Beingin Jaya hendaknya berusaha secepat mungkin menyelesaikan perselisihan antar masyarakat desa dengan adil dan bijaksana, khususnya dalam hal sengketa lahan, agar perselisihan tersebut tidak berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Garna, Judistira K. 2000, *Metode Penelitian Sosial: Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*, Primako Akademika, Bandung
- Hamdi, Muklis. 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamidjojo, Santosa. S. 1978, *Partisipasi dalam Pembangunan*. Universitas Pajajaran, Bandung
- Husein, Umar. 2004, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Juliantara, Dadang, 2003. *Pembaruan Desa, Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Lappera, Jogjakarta
- Masykur, Nur Rif'ah, 2001, *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*, PT Permata Artistika Kreasi, Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1995, *Kepemimpinan yang Efektif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Bina Aksara, Jakarta
- Nucholis, Hanif. 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta
- Rasyid. M. Ryaas. 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Rivai, Veithzal. 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia dari Teori ke Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta
- Salam, Setyawan. 2003, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2000, *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbuan, Masri. 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta

Sugiyono. 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Suprihatini, Amin. 2007, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Cempaka putih, Klaten

Syafii, Inu Kencana. 2007, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (SANRI), Bumi Aksara, Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1991, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*

Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang *Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa*

Media Internet

<http://tutorialkuliah.blogspot.com/2009/05/kuliah-tentang-otonomi-daerah.html>